



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III 2024

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Interim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode Triwulan III Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Itjen KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan KKP pada periode Triwulan III Tahun 2024. Selain itu, laporan ini ditujukan sebagai langkah pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2024 yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi atas perkembangan pencapaian kinerja secara berkala (Triwulanan).

Laporan Kinerja Interim ini disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja Itjen periode Triwulan III Tahun 2024 guna memberikan informasi mengenai perkembangan pencapaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai. Informasi yang disajikan dalam laporan ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan serta proses pencapaian kinerja sehingga diharapkan seluruh target kinerja yang dimandatkan pada tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, target kinerja Inspektorat Jenderal KKP periode Triwulan III Tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan rata-rata Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai **114,50 (kategori istimewa)**. Capaian kinerja Itjen yang diukur pada periode Triwulan III Tahun 2024 antara lain: 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan capaian 0,09% dari target $\leq 0,5\%$; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP dengan capaian 86,11 dari target 84 atau dengan predikat memuaskan (A); 3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP dengan capaian 91,19% dari target sebesar 80%; 4) Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan capaian 125% dari target sebesar 94% dan 5) Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP dengan capaian 100% dari target sebesar 88%.

Pencapaian yang baik pada periode Triwulan III Tahun 2024 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja Itjen ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2024. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal Itjen KKP maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan kinerja ini. Masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern KKP ke depan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 14 Oktober 2024
Inspektur Jenderal


Tornanda Syaifullah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Itjen KKP menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Itjen berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku. Tidak hanya itu, Itjen juga menerapkan praktik-praktik terbaik yang berkembang seiring dengan pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun dari organisasi lain (eksternal). Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada, Itjen harus memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kinerja dan Anggaran Itjen tahun 2024 adalah Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern. Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 2 Sasaran Program dengan 19 Indikator Kinerja. Sasaran Program tersebut adalah: 1) Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP; dan 2) Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif. Itjen melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik (Triwulan).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan III Tahun 2024, seluruh Indikator Kinerja telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi pengelolaan kinerja mencapai **114,50 (kategori istimewa)**. Capaian kinerja Itjen yang diukur pada periode Triwulan III Tahun 2024 antara lain: 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan capaian 0,09% dari target $\leq 0,5\%$; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP dengan capaian 86,11 dari target 84 atau dengan predikat memuaskan (A); 3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP dengan capaian 91,19% dari target sebesar 80%; 4) Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen

Pengetahuan yang Terstandar dengan capaian 125% dari target sebesar 94% dan 5) Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP dengan capaian 100% dari target sebesar 88%. Rangkuman capaian kinerja Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel Capaian Kinerja Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤ 0,5	0,09	181,07	120
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84	86,11	102,51	102,51
	9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen (%)	80	91,19	113,99	113,99
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	125	132,98	120
	13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88	100	113,64	113,64

Dalam hal kinerja pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Itjen pada periode Triwulan III Tahun 2024 dapat dinilai cukup baik. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN per 30 September 2024, realisasi anggaran Itjen pada periode Triwulan III Tahun 2024 dapat dinilai cukup baik. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN per 30 September 2024 realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp61.277.955.319,00 atau sebesar 70,23% dari pagu senilai Rp87.254.343.000,00. Nilai realisasi tersebut hampir mencapai target penyerapan Triwulan III Tahun 2024 yang ditetapkan pada halaman III DIPA (Revisi) sebesar Rp61.651.170.000,00 atau 70,66% dari pagu anggaran Itjen. Dengan demikian, realisasi anggaran Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai 99,39% dari target penyerapan anggaran. Namun demikian realisasi anggaran tersebut masih didalam batas toleransi penyerapan anggaran yang ditetapkan Kemenkeu dengan maksimal deviasi ± 5% dari pagu anggaran.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Itjen sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dengan hasil yang memuaskan. Namun demikian, perlu dilakukan pengendalian dan pemantauan secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tugas, Fungsi dan Peran.....	2
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Maksud dan Tujuan	5
F. Ruang Lingkup.....	5
G. Metodologi.....	5
H. Sistematika Laporan.....	6
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP 2020 – 2024	7
B. Kebijakan Pengawasan.	8
C. Rencana Kinerja Tahunan	11
D. Program dan Kegiatan Pengawasan	12
E. Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja	13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengelolaan Kinerja.....	14
B. Capaian Kinerja	14
C. Realisasi Rencana Aksi	32
D. Realisasi Anggaran.....	33
BAB 4 PENUTUP	35
A. Kesimpulan.....	35
B. Permasalahan	36
C. Langkah Perbaikan (Rekomendasi).....	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2024	12
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja	14
Tabel 3. Capaian Kinerja Kinerja Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024	16
Tabel 4. Perkembangan Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2014-2024	17
Tabel 5. Perkembangan Unit Kerja Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2018-2023	19
Tabel 6. Hasil Evaluasi Untuk Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024	20
Tabel 7. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan III Tahun 2024	24
Tabel 8. Rincian Rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP s.d Semester I Tahun 2024	29
Tabel 9. Survei Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal s.d Triwulan III Tahun 2024	32
Tabel 10. Realisasi Anggaran Itjen periode Triwulan III Tahun 2024 (Per Jenis Belanja)	34

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Tugas, Fungsi dan Peran Itjen	3
2. Struktur Organisasi Itjen KKP	5
3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP	9
4. Jenis Pengawasan Intern Itjen KKP	10
5. Peran Pengawasan Itjen KKP terhadap Program <i>Blue Economy</i>	10
6. Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP	11
7. Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024	15
8. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM	25
9. Capaian Manajemen Pengetahuan lingkup Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024	27

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan nasional untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen KKP berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

B. DASAR HUKUM

Itjen KKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Kebijakan Pengawasan Tahun 2024, Tugas, Fungsi dan Peran Itjen secara umum disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Tugas, Fungsi dan Peran Itjen

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Itjen

Sekretariat Itjen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Itjen.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin), dan Pusat Kebijakan Strategis, unit pelaksana teknis pada Ditjen PKRL, dan unit pelaksana teknis pada Pusdatin.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PT dan Ditjen PSDKP.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Ditjen PB) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PB dan BPPSDMKP.

5. Inspektorat IV

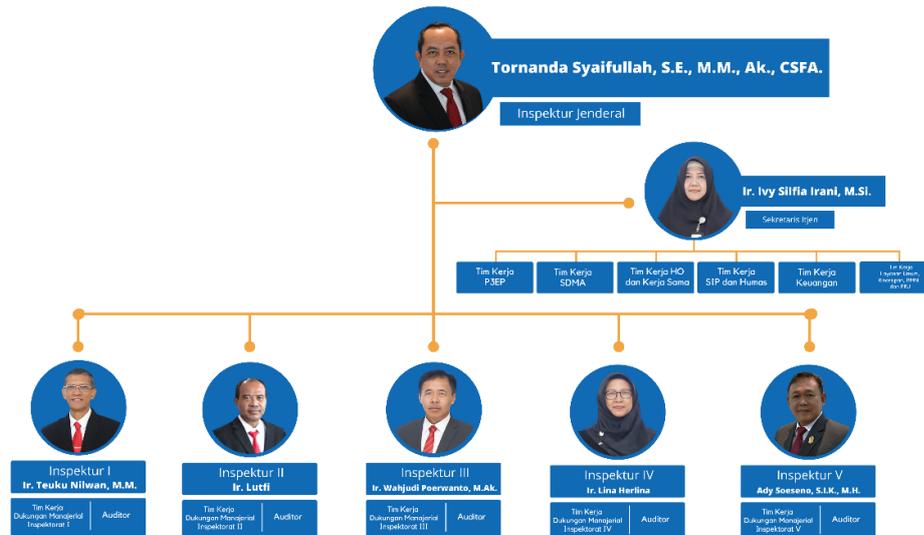
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PDSPKP, dan unit pelaksana teknis pada BPPMHKP dan Ditjen PDSPKP.

6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Itjen, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Struktur organisasi Itjen KKP disajikan pada Gambar berikut.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP



Gambar 2. Struktur Organisasi Itjen KKP

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi dan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran lingkup Itjen periode Triwulan III Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 untuk kemudian merumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kinerja mencakup pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan dimandatkan oleh Menteri Kelautan dan perikanan kepada Inspektur Jenderal dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diukur sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.

G. METODOLOGI

Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2024 disusun dengan metode:

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan.
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan.

- c. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat berupa kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan serta permasalahan yang dihadapi atau perlu diatasi untuk optimalisasi pencapaian kinerja kedepan.
 - d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.
2. Realisasi Anggaran
- Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

H. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan meliputi latar belakang, dasar hukum, tugas, fungsi dan Peran, Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Ruang lingkup, Metodologi dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra KKP dan Itjen KKP, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja; 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan penjabaran atas pencapaian kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya tahun; dan 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, permasalahan, langkah perbaikan (rekomendasi) dan tindak lanjut langkah perbaikan atas rekomendasi pada Triwulan II Tahun 2024.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2020 - 2024 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Dengan visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi:

“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera”

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:

- a. Memberikan Pengawasan Intern Terbaik Untuk Peningkatan Kinerja KKP;*
- b. Mendorong Pengendalian Intern Yang Efektif Terhadap Sistem dan Tata Kelola KKP;*
- c. Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.*

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

- a. *Terwujudnya Kinerja KKP yang Efektif dan Efisien;*
- b. *Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola KKP yang Baik;*
- c. *Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan KKP.*

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Program.

4. Sasaran Program Itjen KKP

Sebagai unit pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui Sasaran Program **“Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP”**

Selanjutnya, sasaran tersebut diuraikan ke level di bawahnya diselaraskan pada level 2 yaitu Inspektorat I s.d V dan Sekretariat Itjen.

B. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun untuk memberikan arah, fokus dan pilihan prioritas program dan kegiatan KKP yang akan diawasi pada Tahun 2024. Dengan adanya kebijakan pengawasan ini, pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen diharapkan menjadi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghasilkan pengawasan intern yang efektif dan efisien dalam mengawal program/kegiatan KKP, khususnya yang menjadi prioritas pimpinan Kementerian. Dalam prosesnya, Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun dengan dasar seperti disajikan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP

Dasar kebijakan pengawasan secara umum meliputi hal-hal yang menjadi rujukan dasar bagi pelaksanaan pengawasan intern oleh Itjen di lingkungan KKP dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelaksanaan program/kegiatan serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berlandaskan kepada dasar kebijakan tersebut, maka ditetapkan Kebijakan Pengawasan Itjen KKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dimensi Pengawasan Intern
 - a. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun lalu (*post*)
 - b. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun berjalan (*on-going*)
 - c. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun mendatang
2. Jenis Pengawasan Intern
 - a. Area Pengawasan Program Prioritas
Kegiatan pengawasan pada area ini dilaksanakan dengan objek berupa program prioritas KKP tahun 2024, yaitu:
 - 1) Pengawasan dalam bentuk *advisory*.
 - 2) Pengawasan dalam bentuk *quality control* dan *quality assurance*
 - 3) Pengawasan dalam bentuk *post audit*
 - b. Area pengawasan *Mandatory*
 - c. Area Pengawasan Tematik

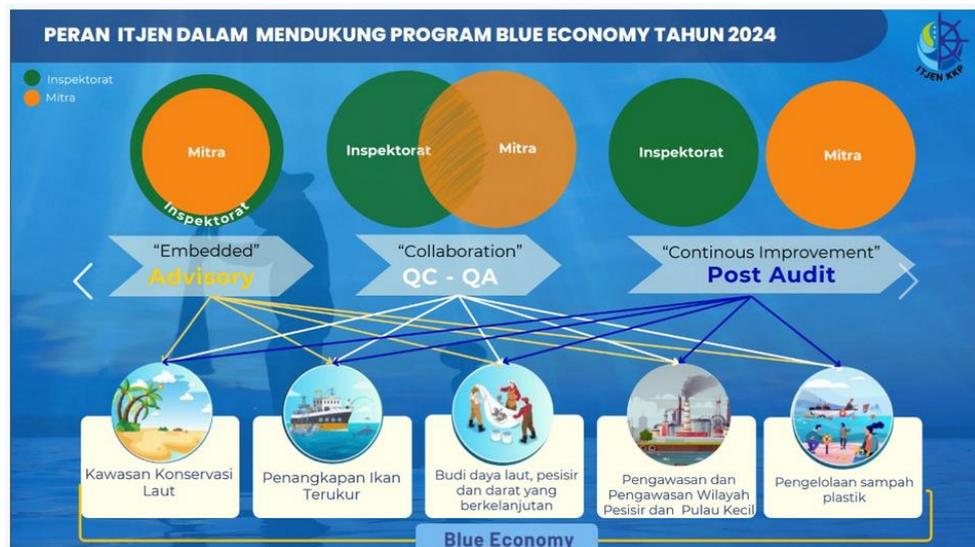
Secara rinci jenis pengawasan Intern Itjen KKP disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 4. Jenis Pengawasan Intern Itjen KKP

3. Peran Itjen terhadap Program *Blue Economy* Tahun 2024

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program *Blue Economy* perlu adanya pengawalan dan pendampingan serta pengawasan yang bersifat solutif. Pengawasan terhadap Program *Blue Economy* dilaksanakan melalui langkah penguatan pengawasan advisory pada tahap perencanaan, melakukan peran *Quality Control* dan *Quality Assurance* sebagai bentuk kolaborasi Itjen dengan Unit Kerja Eselon I dan melakukan *Post Audit* sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Secara rinci peran pengawasan terhadap Program *Blue Economy* disajikan pada Gambar berikut



Gambar 5. Peran Pengawasan Itjen KKP terhadap Program *Blue Economy*

4. Strategi Pengawasan Intern
 - a. Pengawasan Berbasis Risiko
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) sebagai media *Big Data Analyticts*
 - c. Pengawasan Berbasis e-Audit menggunakan *Big Data Analyticts*
- Secara rinci Strategi Pengawasan Itjen Tahun 2024 disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 6. Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2024, Itjen KKP melaksanakan 2 (dua) kegiatan utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp87.254.343.000,00. Kedua kegiatan tersebut adalah:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai Rp38.387.832.000,00.
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran senilai Rp48.866.511.000,00.

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel berikut

Tabel 1. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤ 0,5
	2	Nilai Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,3
	3	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	106
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84 (A)
	5	Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	80,5
	6	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup KKP (%)	82
	7	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82
	8	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82
	9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen (%)	80
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	10	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5
	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (Indeks)	85
	12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88
	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76
	15	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP (Nilai)	86
	16	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18
	17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen (%)	89
	18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80
	19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,16

Penetapan kinerja Itjen KKP Tahun 2024 dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tersaji dalam Lampiran 1.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai unsur pengawasan intern lingkup KKP, Itjen KKP melaksanakan program “Dukungan Manajemen” dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP;
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal.

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
2. Reviu Laporan Keuangan (LK) KKP dan Mitra Itjen KKP;
3. Reviu SAKIP/Laporan Kinerja (LKj) KKP dan Mitra Itjen KKP;
4. Pemantauan Tindak Lanjut;
5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
6. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
7. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM
8. Reviu Perencanaan Program/Kegiatan Mitra Itjen KKP;
9. Reviu Penganggaran Mitra Kerja Itjen KKP
10. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;
11. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
12. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
13. Pendampingan Program Pembangunan KP;
14. Pemantauan Program Strategis bidang KP;
15. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Pencapaian Target Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel di Lampiran 2.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Itjen KKP membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing unit kerja lingkup Itjen untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja berdasarkan warna Biru/Istimewa (110-120), Hijau/Baik (90 - <110), Kuning/Cukup (70 - <90), Merah/Kurang (50 - <70), Hitam/Sangat Kurang (<50), abu-abu (belum ada penilaian) yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	Baik	Nilai 90 - <110
3.	Cukup	Nilai 70 - <90
4.	Kurang	Nilai 50 - <70
5.	Sangat Kurang	Nilai <50
6.	Belum ada penilaian	

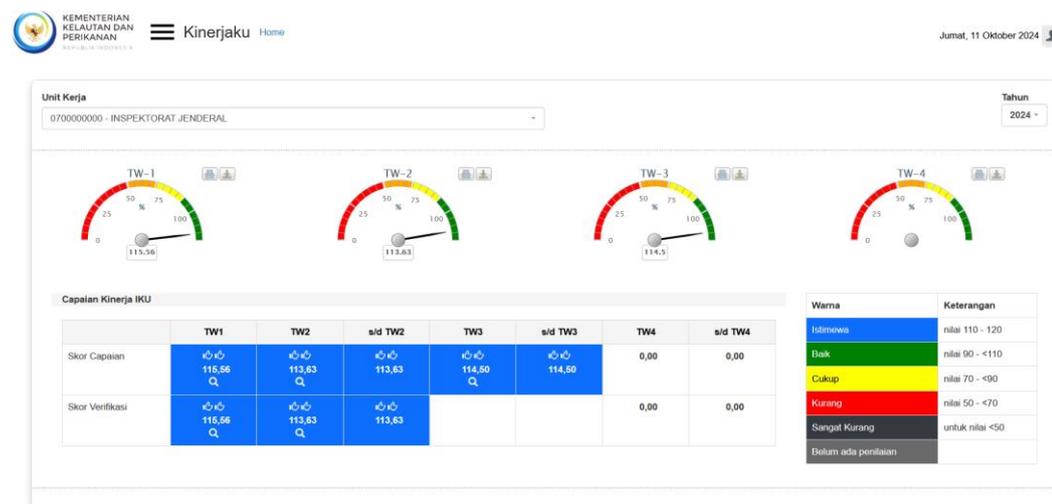
Berdasarkan standar penilaian yang disajikan pada tabel 2 di atas diketahui bahwa untuk mencapai kinerja yang baik maka capaian masing-masing indikator kinerja maupun capaian kinerja secara keseluruhan, minimal harus mencapai nilai setidaknya 90. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang optimal, Itjen melakukan pengendalian secara berkala melalui monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Itjen berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan Sistem Informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai

bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran program/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi capaian kinerja Itjen Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 7. Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan pada gambar di atas diketahui bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar **114,50 (berpredikat “Istimewa”)**. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang telah dilakukan oleh Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 telah optimal. Rincian capaian kinerja Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Kinerja Kinerja Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)	
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤ 0,5	0,09	181,07	120
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84	86,11	102,51	102,51
	9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen (%)	80	91,19	113,99	113,99
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	125	132,98	120
	13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88	113,64	113,64	113,64

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kinerja Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 dapat tercapai dengan hasil memuaskan dimana seluruh target indikator kinerja Itjen dapat tercapai melampaui target yang ditetapkan. Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Secara lebih rinci, uraian capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja program Itjen Triwulan III Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut.

Sasaran Program

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP

Sasaran program ini ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan KKP secara terukur dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Itjen menjadikan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP sebagai Sasaran Program pertama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Itjen dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di lingkungan KKP diukur dan

dipertanggungjawabkan melalui capaian 9 Indikator Kinerja sebagaimana berikut.

IKU-1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2023. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan yaitu pada Triwulan III Tahun 2024.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, realisasi Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP pada Tahun 2024 sebesar 0,09% dari target $\leq 0,5\%$ atau dengan capaian 181,07% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku).

Perkembangan capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2014-2024

Indikator Kinerja	Tahun										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	0,090	0,1506	0,4409	3,64	0.80	0,04	0,18	0,07	0,01	0,12	0,09

Sumber : Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK RI terhadap LK KKP

Upaya yang dilakukan oleh Itjen dalam pencapain target indikator kinerja ini diantaranya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), pengelolaan BMN, pengelolaan keuangan, penerapan SPIP, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, dan Reviu Laporan Keuangan lingkup KKP.

IKM-2. Nilai Maturitas SPIP KKP

Nilai Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum).

Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. berada pada Level 3 (terdefinisi). Level ini secara umum menggambarkan:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, dan
2. Strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Pada Tahun 2024, Itjen KKP menargetkan Nilai Maturitas SPIP KKP dengan Nilai 3,3. Dalam prosesnya, pengukuran Nilai Maturitas SPIP KKP mengacu kepada hasil penilaian BPKP. Namun jika dalam hal BPKP tidak melakukan penilaian atau belum mengeluarkan hasil penilaian saat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, maka Nilai Maturitas SPIP KKP menggunakan hasil penilaian mandiri oleh Itjen KKP. Pengukuran IKM 2 ini dilakukan secara tahunan (Triwulan IV).

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "Terdefinisi" adalah perlu melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi atas kebijakan strategis dan operasional.

IKM-3. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK

Dalam rangka mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola di lingkungan KKP, Itjen menerapkan pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu indikator kinerjanya. Dalam prosesnya, pembangunan dan penilaian Zona Integritas mengacu kepada Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 kemudian diubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, suatu unit kerja dinilai telah menuju WBK/WBBM jika memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran

unit kerja untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam pelaksanaannya, penilaian dilakukan oleh Itjen sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang bertugas untuk menguji apakah unit kerja yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon I lingkup KKP telah berhasil membangun Zona Integritas menuju WBK untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, unit-unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dapat diusulkan untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBBM kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN).

Pengukuran capaian IKM ini berdasarkan jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan WBK berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ditetapkan oleh Menteri KP. Pada tahun 2024, Itjen menargetkan unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK di lingkungan KKP sebanyak 106 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran IKM 3 ini dilaksanakan tahunan pada Triwulan IV tahun 2024. Perkembangan unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup KKP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Unit Kerja Berpredikat menuju WBK lingkup KKP Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	12	22	37	35	42	48	56	64	72	83	90	97

Upaya yang dilakukan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK perlu penguatan koordinasi antar Inspektorat lingkup Itjen serta mitra kerja dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di unit eselon I lingkup KKP.

IKM-4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP adalah nilai yang mencerminkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di lingkup KKP pada periode evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kualitas lima komponen sistem akuntabilitas kinerja yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan,

evaluasi, dan capaian kinerja. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja KKP secara berkelanjutan, Itjen menetapkan nilai SAKIP sebagai salah satu Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Seiring dengan adanya perkembangan dalam kebijakan pedoman penilaian implementasi SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, pada Tahun 2024, Itjen menetapkan target nilai SAKIP KKP sebesar 84 atau kategori A (memuaskan) dan pengukuran dilakukan tahunan pada Triwulan III Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal KKP kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB dengan Nomor B.242/ITJ/HP.440/VIII/2024 perihal Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP pada Tahun 2024 sebesar 86,11 dengan predikat penilaian memuaskan (A) dari target 84 (A) atau dengan capaian 102,51%. Secara rinci hasil evaluasi untuk unit Eselon I lingkup KKP disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Evaluasi Untuk Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024

Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja (%)				Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Predikat Penilaian
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja		
KKP	26,46	25,62	13,09	20,94	86,11	A
Setjen	27,04	26,55	13,58	20,81	87,98	A
Itjen	28,50	26,66	12,60	20,50	88,26	A
Ditjen PT	26,85	27,23	13,39	20,72	88,18	A
Ditjen PB	26,40	24,60	12,54	20,50	84,04	A
Ditjen PSDKP	27,60	27,41	13,05	20,50	88,56	A
Ditjen PDSPKP	27,41	26,10	13,05	20,13	86,69	A
Ditjen PKRL	26,51	27,41	13,80	21,34	89,07	A
BPPMHKP	26,63	26,10	12,66	20,66	86,04	A
BPPSDMKP	27,15	27,68	13,50	20,47	88,79	A

Upaya yang dilakukan Itjen KKP untuk mencapai target IKU ini pada tahun 2024 antara lain, Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024, Evaluasi atas Implementasi SAKIP Eselon I lingkup KKP serta Pendampingan/Asistensi Implementasi SAKIP pada unit kerja di lingkungan KKP.

IKM-5. Nilai Survei Integritas KKP

Nilai Survei Integritas KKP merupakan nilai yang diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tahunan. Survei ini ditujukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga

dan pemerintah daerah. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang sesuai karakteristik instansi masing-masing. Pada Tahun 2024, Nilai Integritas KKP ditargetkan sebesar 80,5 dan pengukuran dilakukan tahunan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendorong pencapaian target nilai integritas KKP diantaranya pengawasan terhadap pembangunan Zona Integritas, Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi dan *Sharing Session* Pembangunan Budaya Integritas kepada seluruh unit kerja dan masyarakat yang menjadi *Stakeholders* KKP, Evaluasi LHKASN, dan Persiapan Survei Penilaian Integritas.

IKU-6. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP

Indikator kinerja ini ditujukan untuk menjaga kualitas pengawasan dan mendorong tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, kegiatan prioritas/strategis yang menjadi fokus pengukuran adalah kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya (T-1) oleh unit eselon I lingkup KKP. Secara garis besar, pengukuran IKU ini dilakukan dengan menggunakan parameter penilaian kualitas kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh unit eselon I dan kualitas pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Itjen. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 82% yang diukur secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup KKP dengan menggunakan Parameter penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

IKU-7. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan KKP merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Itjen KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, tingkat Efektifitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 82% dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2024. Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP.

IKU-8. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan

kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif, pada tahun 2024, Itjen menetapkan indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dengan target 82% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV tahun 2024 melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan PBJ Unit Eselon I lingkup KKP.

IKU-9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP yang ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan). Pengukuran capaian IKU 9 ini pada Triwulan III Tahun 2024 adalah diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 Juni 2024 (Triwulan II Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 September Tahun 2024 (Triwulan III Tahun 2024). Target IKU 9 Tahun 2024 adalah 80% yang diukur secara Triwulanan dengan target yang sama.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 91,19% dari target 80% atau dengan capaian 113,99%. Secara rinci IKU 9 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan III Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	(%) Sisa Rekom
1	Setjen	130	130	100,00	0	0,00
2	Ditjen PKPRL	313	300	95,85	13	4,15
3	Ditjen Perikanan Tangkap	438	357	81,51	81	18,49
4	Ditjen PSDKP	122	119	97,54	3	2,46
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	662	595	89,88	67	10,12
6	BPPSDMKP	179	170	94,97	9	5,03
7	Ditjen PDSPKP	105	100	95,24	5	4,76
8	BPPMHKP	316	296	93,67	20	6,33
9	Itjen	40	35	87,50	5	12,50
TOTAL		2.305	2.102	91,19	203	8,81

Upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Inspektorat lingkup Itjen terhadap mitra kerjanya. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Itjen dilakukan melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK) yang memungkinkan mitra kerja untuk menindaklanjuti hasil pengawasan secara daring. Tidak hanya itu, komitmen dan keseriusan dari unit kerja untuk segera menyelesaikan saran yang diberikan oleh Itjen akan sangat menentukan capaian kinerja IKU ini.

IKU-10. Tingkat Kapabilitas Itjen KKP

Internal Audit Capability Model (IACM) adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF)* untuk memperkuat atau meningkatkan audit intern melalui langkah evolusi kecil yang terdiri dari 5 (lima) level kapabilitas progresif, yaitu: (1) *initial*; (2) *structured*; (3) *delivered*; (4) *institutionalized*; dan (5) *optimized*. Bila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, IACM merupakan:

1. Sarana komunikasi (*communication vehicles*): dasar untuk mengkomunikasikan apa yang disebut sebagai audit intern yang efektif dan bagaimana audit intern melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan untuk menunjukkan pentingnya audit intern bagi pengambil keputusan.
2. Kerangka penilaian (*framework for assessment*): kerangka untuk menilai kemampuan unit audit intern dalam memenuhi standar profesional dan praktik audit intern, baik melalui penilaian sendiri atau penilaian eksternal.

- Peta jalan perbaikan secara terarah (*road map for orderly improvement*): peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan audit intern.

Dengan kata lain, IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif dimana setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Dalam pelaksanaannya, penilaian tingkat kapabilitas APIP dengan metode IACM dilakukan oleh BPKP, namun demikian dalam hal BPKP tidak melakukan penilaian maka APIP dapat melakukan penilaian secara mandiri. BPKP melakukan penilaian terhadap tingkat kapabilitas Itjen KKP tahun 2024. Sedangkan karakteristik kapasitas APIP dapat disampaikan sebagai berikut:



Gambar 8. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM

Target Tingkat Kapabilitas Itjen KKP pada Tahun 2024 adalah pada nilai 3,5 yang pengukurannya dilakukan secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2024. Upaya yang dilakukan sebagai persiapan evaluasi penilaian oleh BPKP ataupun Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP telah menyusun Tim IACM Itjen KKP untuk mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan IACM di Itjen KKP.

IKM-11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan (Permen PAN dan RB

Nomor 38 Tahun 2018). Pada Tahun 2024, target nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP sebesar 85 dan akan dilakukan penilaian secara semesteran oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP dengan pengambilan data meliputi :

1. Kualifikasi/Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan dari Aplikasi e-Pegawai KKP;
2. Kompetensi (Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan Seminar) dari Aplikasi SIASN BKN;
3. Kinerja atau SKP dari Aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN;
4. Displin atau SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Aplikasi e-Pegawai KKP.

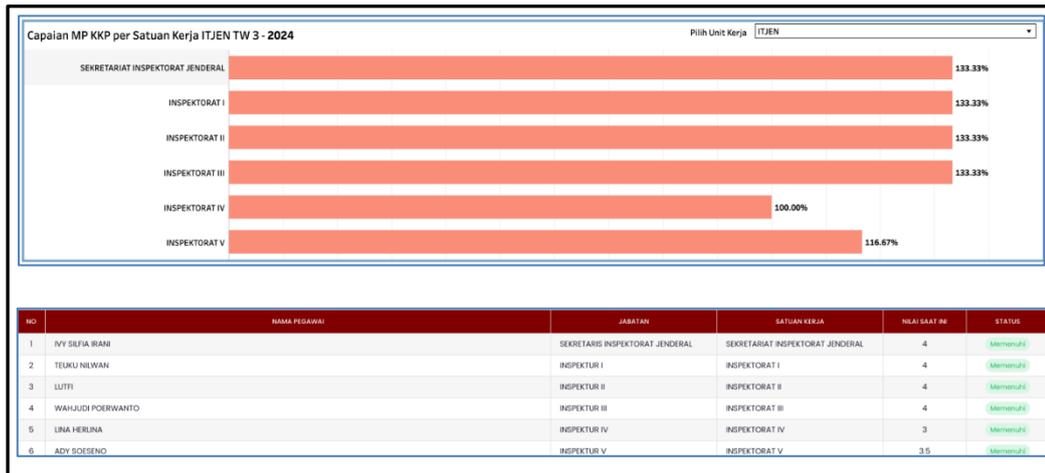
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, realisasi IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen sebesar 85,77 dari target semester I Tahun 2024 sebesar 78 atau dengan capaian atau 109,96%.

Upaya yang dilakukan Itjen KKP dalam meningkatkan kompetensi dan integritas pegawainya antara lain melalui penilaian kompetensi pegawai, pendidikan dan pelatihan, dan penerapan kode etik, pengukuran SKP, dan monitoring kehadiran pegawai.

IKM-12. Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Capaian IKM ini diukur Triwulanan dan perhitungannya didasarkan pada penggunaan aplikasi *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Target IKM 12 tahun 2024 adalah sebesar 94% yang diukur secara Triwulanan dengan target sama.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Setjen KKP Nomor 3820/SJ.7/TU.210/X/2024, perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan KKP Triwulan III 2024, realisasi IKU Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024 adalah 125% dari target 94% atau dengan capaian 132,98% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerja). Secara rinci capaian IKU 12 lingkup Itjen KKP disajikan pada Gambar 9 berikut.



Gambar 9. Capaian Manajemen Pengetahuan lingkup Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKM ini adalah secara berkala melakukan pemantauan atas perkembangan keaktifan penggunaan aplikasi *platform Portal Collaboration Office* lingkup Itjen.

IKM-13. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP

Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP merupakan sebuah ukuran dari implementasi penggunaan sistem teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan oleh unit kerja lingkup Itjen KKP. Penggunaan sistem informasi pengawasan tersebut diukur dari rata-rata jumlah persentase implementasi aplikasi dukungan pengawasan yang terdiri dari Aplikasi SIMWAS dan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) yang diukur secara Triwulan dengan target yang sama yaitu sebesar 88%.

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Itjen KKP Nomor 1718/ITJ.0/TU.140/X/2024, perihal Capaian IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Triwulan III Lingkup Itjen KKP Tahun 2024, realisasi IKM Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dari target 88% atau dengan capaian 113,64%.

Upaya yang akan dilakukan oleh Itjen adalah melakukan pengembangan aplikasi AMS untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pengawasan intern saat ini. Selain itu, Itjen akan melakukan pengendalian implementasi tindak lanjut hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK dengan cara menyelenggarakan

kegiatan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK secara berkala.

IKM-13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian *Output*. Pada Tahun 2024, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP diukur secara semesteran dengan target di Semester I sebesar 83 dan Semester II sebesar 93,76.

Realisasi IKM Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP pada Semester I Tahun 2024 sebesar 99,18 dari target 83 atau dengan capaian 119,49%.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target IKM 13 ini adalah melakukan pemantauan kepatuhan atas indikator pelaksanaan anggaran lingkup Itjen secara periodik (bulanan) meliputi Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

IKM-15. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah daerah. NKA merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Nilai diperoleh berdasarkan data input dan output yang dimasukkan oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu. Data Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diunduh dari aplikasi SMART DJA Kemenkeu sebagai dasar capaian kinerja anggaran Itjen KKP yang akan diukur secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2024 dengan target 86.

Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP adalah secara periodik (bulanan dan triwulanan) dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja seluruh level lingkup Itjen.

IKU-16. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP

Rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP adalah rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP kepada seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengawasan tahun 2024, yaitu selain sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*), Itjen perlu menitikberatkan perannya sebagai konsultan (*Advisory Services*) yang akan memberikan jasa konsultasi serta saran perbaikan dalam proses pelaksanaan program/kegiatan juga pada tataran kebijakan.

Pada tahun 2024, Itjen KKP menargetkan untuk melakukan pengawasan atau kajian terhadap minimal 18 kebijakan/peraturan/prosedur operasi lingkup KKP, yang pengukurannya dilakukan secara semesteran dengan target yang sama sebanyak 9 kebijakan/peraturan/prosedur operasi setiap semester.

Perkembangan realisasi IKU Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP s.d Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak 12 Rekomendasi dari target 9 Rekomendasi. Secara rinci rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP s.d Semester I Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 8. Rincian Rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP s.d Semester I Tahun 2024

No	Uraian	Unit Kerja
1.	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Lingkungan KKP	Inspektorat I
2.	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Atas Kepmen-KP Nomor 5 Tahun 2024	Inspektorat I
3.	Telaahan dan Masukan atas Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pembatalan SLO dan SKP SLO serta Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan	Inspektorat II
4.	Telaahan dan Masukan atas Perhitungan Total Nilai Investasi Terkait Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP	Inspektorat II
5.	Masukan Terhadap Rancangan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Pemerintah di Lingkup Direktorat Perbenihan Tahun 2024	Inspektorat III
6.	Masukan Terhadap Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Lobster	Inspektorat III
7.	Masukan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pelatihan Masyarakat dil Lingkungan KKP	Inspektorat III
8.	Kajian atas Tambahan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan BLU Bersumber dari Rupiah Murni	Inspektorat III
9.	Saran Masukan Atas Rancangan Keputusan Dirjen PDSPKP tentang Pedoman Nilai Tukar Pengolahan Hasil Perikanan	Inspektorat IV
10.	Saran Masukan atas Rancangan Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan	Inspektorat IV
11.	Masukan/Tanggapan atas Draft Keputusan Inspektur Jenderal Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Reward Dan Punishment (Penghargaan Dan Sanksi) Bagi Petugas Pelayanan Publik pada Inspektorat Jenderal KKP	Inspektorat V

No	Uraian	Unit Kerja
12.	Masukan/Tanggapan Atas Rancangan Peraturan Menteri KP Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KP Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	Inspektorat V

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target IKU 16 ini adalah pengawasan dilakukan untuk mendorong penyempurnaan dan penguatan implementasi kebijakan/peraturan/prosedur terkait tata kelola pelaksanaan program/kegiatan pada mitra kerja.

IKU-17. Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen KKP adalah jumlah penugasan dan pelaporan hasil audit juga evaluasi yang dilaksanakan oleh Itjen KKP terhadap mitra kerja yang memenuhi standar mutu pengawasan berdasarkan tingkat kepatuhan penyampaian dan kualitas formulir Kendali Mutu Pengawasan (KMP). Pada tahun 2024, kegiatan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan secara optimal ditargetkan 89% dari seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan yang diukur secara semesteran.

Perkembangan realisasi IKU Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen KKP s.d Semester I Tahun 2024 adalah sebesar 97,00% dari target 89% atau dengan capaian 108,99%.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU 17 adalah Itjen KKP akan terus melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu pengawasan, diantaranya melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh aparat pengawasan Itjen dalam mengimplementasikan pengendalian secara berjenjang. Lebih lanjut, Itjen juga akan terus melakukan evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan secara periodik di bawah koordinasi Inspektorat V untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan.

Selain itu, Itjen juga melakukan evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan setiap semester dikoordinasikan oleh Inspektorat V untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan.

IKU-18. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP

Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah persentase kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan dengan PKPT yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT ditargetkan sebesar 80% dari seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dan diukur secara semesteran.

Perkembangan realisasi IKU Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP s.d Semester I Tahun 2024 adalah sebesar 98,68% dari target 80% atau dengan capaian 123,35% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku).

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini adalah melaksanakan pemantauan atas kepatuhan PKPT masing-masing Inspektorat lingkup Itjen yang dilakukan secara periodik.

IKM-19. Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP

Indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan Itjen KKP adalah suatu penilaian/persepsi pegawai lingkup KKP terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen pada suatu unit kerja yang menjadi objek pengawasan. Indeks persepsi pegawai KKP diperoleh dari kegiatan survei dengan perangkat kuesioner yang berisi parameter untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai KKP terhadap pelaksanaan pengawasan Itjen KKP. Pada Tahun 2024 IKM ini dengan target sebesar 4,16 (skala 1-5) yang diukur secara semesteran.

Hasil Survei Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP s.d Triwulan III Tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 582 pada 41 satker yang terdiri dari 23 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 18 satker pusat dengan realisasi 4,35 (skala *likert* atau sangat puas) dari target 4,16 atau dengan capaian sebesar 104,57%.

Tabel 9. Survei Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal s.d Triwulan III Tahun 2024

No	Nama Satker	Jumlah Responden	Nilai Skala Likert
1.	BPPMHKHP Pangkal Pinang	13	4,60
2.	PPN Sungailiat	15	4,27
3.	BRPPUPP Palembang	15	4,34
4.	Stasiun KIPM Palembang	16	4,56
5.	BPSPL Padang	15	4,30
6.	Stasiun KIPM Padang	7	4,16
7.	Politeknik AUP Pasar Minggu	16	4,39
8.	PPS Cilacap	15	4,35
9.	Stasiun PSDKP Cilacap	15	4,40
10.	BBPPPKP Cilangkap	14	4,22
11.	BKIPMKHP Semarang	14	4,20
12.	BBPBAP Jepara	15	4,41
13.	BKIPMKHP Surabaya II	16	4,55
14.	PPN Brondong	15	4,56
15.	Biro Keuangan dan BMN	12	4,35
16.	Sekretariat Ditjen PT	15	4,20
17.	Direktorat PDK DJPT	10	4,28
18.	Sekretariat Ditjen PB Pusat PM BPPMHKHP	15	4,32
19.	Sekretariat Ditjen PB	11	4,23
20.	Direktorat KKI DJPB	15	4,20
21.	Direktorat Logistik, DJPDSKPK	11	4,37
22.	Biro Hukum Setjen	14	4,30
23.	Biro SDMAO Setjen	15	4,29
24.	Sekretariat Ditjen PSDKP	15	4,19
25.	Sekretariat Ditjen PDSPKP	15	4,41
26.	Sekretariat BPPSDMKP	15	4,23
27.	BHKLN Setjen	15	4,33
28.	Pusdatin	13	4,60
29.	Biro Umum dan PBJ	15	4,38
30.	Sekretariat Ditjen PKRL	15	4,20
31.	Direktorat PRL	15	4,44
32.	Biro Perencanaan Setjen	15	4,44
33.	BPPP Tegal	15	4,33
34.	SUPM Tegal	15	4,47
35.	BPKIL Serang	9	4,21
36.	LPSPL Serang	15	4,48
37.	Stasiun KIPM Yogyakarta	15	4,35
38.	LRMPHP Bantul Yogyakarta	16	4,16
39.	BKIPMKHP Surabaya I	15	4,45
40.	PPN Prigi Surabaya	15	4,67
41.	PPN Karangantu Banten	15	4,23
	Jumlah / Rata-Rata	582	4,35

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target IKM antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dan profesionalitas yang dilaksanakan oleh Itjen KKP dengan lebih mendorong kegiatan *advisory services*.
- b. Melakukan sosialisasi secara terus menerus (setiap apel pagi) dalam upaya mendorong setiap pelaksanaan pengawasan telah merujuk pada kode etik pengawasan.
- c. Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan standar dan kode etik yang berlaku.

- d. Meningkatkan kapabilitas aparaturnya sehingga mampu menjawab tantangan dan kondisi terkini dalam pelaksanaan tugasnya.

C. REALISASI RENCANA AKSI

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Realisasi rencana aksi pencapaian indikator kinerja Itjen KKP pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada Lampiran 2.

Rencana aksi pencapaian indikator kinerja Itjen KKP pada Triwulan III Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 455 kegiatan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 475 kegiatan atau terealisasi 104,40% dari kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini terkait jumlah satker yang dilakukan Survei Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal semakin banyak dari target s.d Triwulan III sebanyak 24 satker telah terealisasi sebanyak 41 satker dan realisasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Triwulan II Tahun 2024 dari target sebanyak 9 Rekomendasi dengan realisasi 12 Rekomendasi. Tidak ditemukan kendala berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana aksi pencapaian target kinerja periode Triwulan III Tahun 2024.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Itjen pada periode Triwulan III Tahun 2024 dapat dinilai cukup baik. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN per 30 September 2024 realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp61.277.955.319,00 atau sebesar 70,23% dari pagu senilai Rp87.254.343.000,00. Nilai realisasi tersebut hampir mencapai target penyerapan Triwulan III Tahun 2024 yang ditetapkan pada halaman III DIPA (Revisi) sebesar Rp61.651.170.000,00 atau 70,66% dari pagu anggaran Itjen. Dengan demikian, realisasi anggaran Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai 99,39% dari target penyerapan anggaran. Namun demikian realisasi anggaran tersebut masih didalam batas toleransi penyerapan anggaran yang ditetapkan Kemenkeu dengan maksimal deviasi $\pm 5\%$ dari pagu anggaran.

Rincian realisasi anggaran Itjen periode Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Itjen periode Triwulan III Tahun 2024
(Per Jenis Belanja)

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp/%)	Sisa (Rp/%)
1.	Belanja Pegawai	37.026.995.000	27.199.430.710 (73,46%)	9.827.564.290 (26,54%)
2.	Belanja Barang	47.519.638.000	32.319.046.434 (68,01%)	15.200.591.566 (31,91%)
3.	Belanja Modal	2.707.710.000	1.759.478.175 (64,98%)	948.231.825 (35,02%)

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Itjen KKP pada Triwulan III Tahun 2024 antara lain :

1. Berdasarkan aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen KKP pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar **114,50 (berpredikat “Istimewa”)**. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang dilakukan Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 telah optimal.
2. Berdasarkan hasil pengukuran pada Triwulan III Tahun 2024, dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur, seluruh target indikator kinerja Itjen dapat tercapai melampaui target (capaian >100%), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP sebesar 0,09 dari target $\leq 0,5\%$ atau dengan capaian 181,07% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku).
 - b. Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP pada Tahun 2024 sebesar 86,11 dengan predikat penilaian memuaskan (A) dari target 84 (A) atau dengan capaian 102,51%.
 - c. Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 91,19% dari target 80% atau dengan capaian 113,99%.
 - d. Realisasi IKU Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024 adalah 125% dari target 94% atau dengan capaian 132,98% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku).
 - e. Realisasi IKM Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dari target 88% atau dengan capaian 113,64%.
3. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN per 30 September 2024 realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp61.277.955.319,00 atau sebesar 70,23% dari pagu senilai Rp87.254.343.000,00. Nilai realisasi tersebut hampir mencapai target penyerapan Triwulan III Tahun 2024 yang ditetapkan pada halaman III DIPA (Revisi) sebesar Rp61.651.170.000,00 atau 70,66% dari pagu anggaran Itjen. Dengan demikian, realisasi anggaran Itjen pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai 99,39% dari target penyerapan anggaran dengan deviasi negatif sebesar 0,61%. Namun demikian realisasi

anggaran tersebut masih didalam batas toleransi penyerapan anggaran yang ditetapkan Kemenkeu dengan maksimal deviasi $\pm 5\%$ dari pagu anggaran.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak ditemukan kendala/masalah yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Itjen karena secara umum capaian kinerja Itjen dapat melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk menjaga kualitas pencapaian target kinerja ke depan, khususnya Triwulan IV Tahun 2024 sebagai periode akhir tahun 2024 diperlukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan proses optimalisasi penyerapan anggaran.

C. LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2024 diperlukan pembahasan dan/atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan rencana optimalisasi penyerapan anggaran periode Triwulan IV Tahun 2024.

D. TINDAK LANJUT LANGKAH PERBAIKAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Dalam rangka menjaga kualitas capaian kinerja Itjen pada periode Triwulan III Tahun 2024, telah dilakukan upaya pemantauan berupa persiapan pengukuran kinerja dan pelaksanaan Pengukuran Kinerja periode Triwulan III Tahun 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Itjen KKP Tahun 2024


**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tornanda Syaifullah**
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

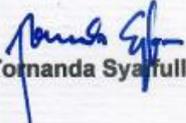
Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

<p>Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan</p>  Sakti Wahyu Trenggono	<p>Pihak Pertama Inspektur Jenderal</p>  Tornanda Syaifullah
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL**

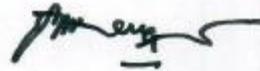
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
	2	Nilai Maturitas SPIP KKP (nilai)	3,3
	3	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	106
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84 (A)
	5	Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	80,5
	6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	82
	7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82
	8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	80
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	10	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5
	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (Indeks)	85
	12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88
	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76
	15	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	86
	16	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18
	17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	89
	18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80
	19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,16

Data Anggaran :

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Dukungan Manajemen		
1.	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	38.387.832.000
2.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	48.866.511.000
Total Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024		87.254.343.000

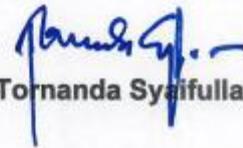
Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Inspektur Jenderal



Tornanda Syarifullah

Lampiran 2. Rencana Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Itjen KKP Triwulan II Tahun 2024

Anggaran: Rp87.254.343.000,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	NO	KEGIATAN PENDUKUNG	SATUAN	TW I		TW II		TW III		JUMLAH 2024		%
						T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5	1	Reviu Laporan Keuangan	Kegiatan	9	9	0	0	0	0	9	9	100
			2	Reviu RKA-K/L (Penganggaran)	Kegiatan	0	0	9	9	0	0	18	9	50
			3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Kegiatan	0	0	2	2	0	0	11	2	18,18
			4	Pengawasan Pengelolaan BMN	Kegiatan	16	16	0	0	4	4	31	20	64,52
			5	Pengawasan Penyerapan Anggaran	Kegiatan	10	10	6	6	8	8	32	24	75
			6	Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	39	39	5	5	11	11	71	55	77,46
			7	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan	Kegiatan	29	29	5	5	4	4	43	38	88,37
			8	Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	5	5	8	8	8	8	32	21	65,63
			9	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	Unit Es. I	10	10	0	0	0	0	10	10	100
2	Nilai Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,3	1	Pengawasan Manajemen Risiko Mitra	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			2	Pendampingan/Asistensi Implementasi SPI Mitra	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			3	Evaluasi Maturitas SPIP	Kegiatan	0	0	0	0	1	1	1	1	100
3	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	106	1	Pendampingan/Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	12	12	100
			2	Pemantauan/Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	0	0	4	4	0	0	4	4	100
			3	Penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Unit Kerja	0	0	0	0	12	12	12	12	100
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84 (A)	1	Reviu Laporan Kinerja	Kegiatan	10	10	0	0	0	0	10	10	100
			2	Pendampingan/Asistensi SAKIP	Kegiatan	0	0	2	2	0	0	2	2	100
			3	Evaluasi SAKIP	Kegiatan	0	0	0	0	10	10	10	10	100
5	Nilai Survei Integritas KKP (nilai)	80,5	1	FGD metode Survey Integritas	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			2	Survei Integritas Unit Eselon I lingkup KKP	Kegiatan	0	0	0	0	1	1	1	1	100
6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	82	1	Pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	0	0	8	8	8	8	16	16	100
			2	Pemantauan/Evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82	1	Pengawasan Pengelolaan BMN	Kegiatan	8	8	0	0	0	0	8	8	100
			2	Evaluasi/Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	9	0	0
8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82	1	Pengawasan PBJ	Kegiatan	4	4	4	4	0	0	8	8	100
			2	Evaluasi/Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ Mitra	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	9	0	0
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	80	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada mitra	Kegiatan	9	9	9	9	9	9	36	27	75
10	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5	1	Penetapan Tim Penguatan Kapabilitas Itjen	Dokumen	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			2	Rapat Koordinasi Penguatan Kapabilitas Itjen	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	1	1	100
			3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	24	18	75
			4	Pengembangan Sistem Informasi Itjen	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	4	3	75

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	NO	KEGIATAN PENDUKUNG	SATUAN	TW I		TW II		TW III		JUMLAH 2024		%
						T	R	T	R	T	R	T	R	
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (indeks)	85	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	24	18	75
			2	Monev Presensi Pegawai Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
			3	Monev SKP Pegawai	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	12	9	75
12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	1	Pelaporan Kinerja Tahun 2024	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			2	Perencanaan Kinerja Tahun 2024 lingkup Itjen	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			3	Pemantauan tingkat pemenuhan partisipasi pada Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen KKP (<i>Portal Collaboration Office</i>)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88	1	Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lingkup Itjen KKP	Kegiatan	1	1	0	0	1	1	2	2	100
			2	Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Lingkup Itjen KKP	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			3	Pengembangan Sistem Informasi Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
			4	Pemantauan implementasi Sistem Informasi Itjen	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	4	3	75
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76	1	Manajemen risiko lingkup Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
			2	Pemantauan realisasi pelaksanaan kegiatan/ anggaran Itjen	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	12	9	75
			3	Pemantauan dan Pelaporan pelaksanaan PBJ Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
15	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP (Nilai)	86	1	Pemantauan realisasi pelaksanaan kegiatan/ anggaran Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
			2	Monev Capaian Kinerja Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
16	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18	1	Kajian/Evaluasi/Riviu Kebijakan lingkup mitra	Kegiatan	0	0	9	12	0	0	18	12	66,67
17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	89	1	Monitoring Implementasi Kendali Mutu Pengawasan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
			2	Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	2	1	50
18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80	1	Monitoring Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4	3	75
			2	Evaluasi Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	2	1	50
19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)	4,16	1	Penandatanganan Pakta Integritas Itjen	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			2	Publikasi informasi dan kinerja pengawasan intern KKP	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	8	6	75
			3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan Itjen	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	24	18	75
			4	Survei Persepsi Pegawai atas Kinerja Itjen	Kegiatan	8	9	8	9	8	23	24	41	170,83